

**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) RESES KOMISI I DPR RI**  
**PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019**  
**KE PROVINSI JAWA BARAT (KOTA BANDUNG)**  
**29-31 MARET 2019**

---

Komisi I DPR RI pada tanggal 29-31 Maret 2019 melaksanakan Kunker Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung). Kunjungan dipimpin oleh Mayjen TNI (Pur), Supiadin Aries Saputra dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi I DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunker Spesifik ke Jawa Barat (Bandung) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI yaitu mengunjungi mitra-mitra kerja Komisi I yang ada di level daerah untuk menyerap aspirasi masing-masing mitra. Diantaranya Mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan dan peran juga masukan Komisi Informasi Provinsi (K.I. Provinsi) Jawa Barat terkait Peran Komisi Informasi Daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik dalam Pemilu Tahun 2019.

Dalam pertemuan tersebut diatas, Ketua K.I. Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa K.I. Provinsi Jawa Barat sudah berlangsung 2 periode yaitu: Periode I (2011-2015) dan Periode II (2015-2019) dan telah menjalankan 3 Program Penerapan UU KIP yaitu: Penyelesaian sengketa informasi publik, Advokasi penguatan penerapan UU KIP oleh badan publik dan Sosialisasi hak dan pemanfaatan informasi publik. Terkait pemilu, K.I. Provinsi Jawa Barat sudah melakukan Kerjasama di tahun 2018 dengan 5 perguruan tinggi kemudian kerjasama sosialisasi UU KIP di berbagai badan publik (34 kali sosialisasi) dan kerjasama Pengembangan kemitraan pengawalan penerapan UU KIP dengan WAKCABALAKA (Forum Masyarakat Peduli keterbukaan Informasi Publik) dan organisasi mahasiswa. Ditambahkan, Pemilu dan pemilihan K.I. Provinsi Jawa Barat melakukan Strategi Penguatan dan pendampingan pada penyelenggara dan peserta Pemilu dan pemilihan, kemudian Peningkatan ketersediaan informasi secara berkala dan Apresiasi penyelenggara pilkada 2018.

Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI mengapresiasi paparan K.I. Provinsi Jawa Barat atas penjelasan terkait Peran Komisi Informasi Daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik dalam Pemilu Tahun 2019. Komisi I DPR RI mendesak K.I. Provinsi Jawa Barat untuk dapat meningkatkan peranya dalam membantu hak masyarakat untuk lebih mengetahui informasi-informasi dan program-program dari pemerintah dan juga K.I. Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilu dalam memberikan hak keterbukaan informasi Publik yang dapat diakses dan diberikan kepada/oleh masyarakat. Komisi I DPR RI juga mendesak KI-Provinsi Jawa Barat untuk dapat memonitor dan mengingatkan Bupati/Walikota untuk dapat memberikan hak keterbukaan informasi-informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Dan terakhir, Komisi I DPR RI menekankan K.I. Provinsi Jawa Barat untuk dapat berkoordinasi dengan media penyiaran seperti LPP RRI dan LPP TVRI dalam mensosialisasikan Pemahaman akan Keterbukaan Informasi Publik di daerah.

Bandung, 31 Maret 2019

Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Bandung).